

Kasus Covid Bertambah, Danang Bagikan Masker



KR-Istimewa

Wabup Danang membagikan masker di pasar.

SLEMAN (KR) - Sebagai upaya antisipasi peningkatan dan penyebaran Covid-19, Pemkab Sleman kembali gencarkan gerakan memakai masker. Gerakan memakai masker ditandai dengan pembagian masker di Pasar Cebongan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. "Gerakan memakai masker yang diwujudkan dalam bentuk pembagian masker ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kembali

kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatannya. Apalagi adanya penambahan kasus Covid-19 di Sleman akhir-akhir ini," jelas Danang kepada *KR*, Kamis (4/8).

Menurut Danang, kampanye penerapan protokol kesehatan ini tidak berhenti di kegiatan pembagian masker saja, Pemkab Sleman juga akan terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Pada kenyataannya Covid-19 ini masih ada, dan mungkin masih ditemukan sebagian masyarakat yang lalai dalam penerapan protokol kesehatan karena levelnya sudah turun. Maka dari itu kami akan terus kampanye, sosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait antispasi penyebaran covid dengan penerapan protokol kesehatan, salah satunya penggunaan masker," katanya.

Sementara Kasatpol PP Sleman Shavitri Nurmala Dewi menjelaskan, dalam mengkampanyekan gerakan memakai masker ini menysasar dua lokasi yaitu pasar dan sekolah.

"Kita menysasar pasar dan sekolah dalam gerakan memakai masker ini karena kedua lokasi tersebut memiliki potensi adanya penyebaran Covid-19," jelasnya, seraya menyebutkan telah menyiapkan 1.000 masker untuk dibagikan. **(Has)-f**

DUKUNG TARGET JUARA UMUM PORDA
Disnaker Bantu Atlet Karate Sleman

SLEMAN (KR) - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman selaku pendamping cabang olahraga karate, mendukung penuh upaya Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Sleman bisa meraih juara umum Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY tahun 2022.

Selain memotivasi para atlet karate Sleman agar lebih semangat berlatih, Disnaker Sleman juga memberi berbagai bantuan sarana penunjang latihan.

Bantuan yang diberikan Disnaker Sleman berupa kaos seragam, aneka minuman serta sejumlah uang, diserahkan oleh Kepala Disnaker Sleman Sutiasih kepada Ketua FORKI Sleman Edy Suryanto di Aula Disnaker Sleman, Rabu (3/8) sore.

"Untuk mendukung KONI Sleman dalam mewujudkan Sleman Hatrick Lagi, semua satuan kerja Pemerintah Daerah kabupaten Sleman melakukan pendampingan terhadap salah satu cabang olahraga



KR-Istimewa

Kepala Disnaker Sleman Sutiasih menyerahkan bantuan untuk atlet karate.

ga yang akan bertanding dalam Porda DIY mendatang. Disnaker ditunjuk untuk mendampingi FORKI, sehingga kami terus berupaya mendorong para atlet karate Sleman untuk lebih rajin berlatih. Dengan sering berlatih tersebut diyakini para atlet karate Sleman dapat memenangkan pertandingan," kata Sutiasih.

Sementara Ketua FORKI Sleman Edy Suryanto mengaku mendukung pe-

nuh upaya KONI Sleman untuk bisa meraih juara umum lagi. Apabila target itu terwujud, Sleman akan mencetak hatrick yang kedua kalinya.

"Untuk bisa meraih target tersebut, sejak beberapa bulan terakhir hingga akhir bulan Agustus mendatang atlet kami gencar berlatih, dan kami optimis target tersebut bisa tercapai," kata Edy yang juga Dosen Fakultas Peternakan UGM tersebut. **(Has)-f**

ILEGAL, TELUSURI DAN TINDAK TEGAS
Perizinan Pertambangan Kembali Diserahkan ke Provinsi

SLEMAN (KR) - Perizinan usaha tambang yang sebelumnya ada di pemerintah pusat kembali didelegasikan ke provinsi. Dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perpres tersebut rencananya mulai berlaku Agustus nanti. Untuk itu saat ini Pemda DIY sedang menyiapkan beberapa hal, seperti berkaitan dengan perizinan dan sebagainya.

"Pada dasarnya kami siap dengan Perpres tersebut. Kami juga berharap ada kerja sama, baik dari pemerintah daerah, pusat dan semua elemen yang ada di masyarakat," kata Sekretaris Dinas Pekerja-

an Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Kusno Wibowo dalam Bimtek Pelatanaan Usaha Mineral dan Batubara bersama anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Batubara di Hotel Grand Keisha Depok Sleman, Kamis (4/8).

Sebelumnya masalah perizinan pertambangan sudah ada di provinsi. Na-



KR-Atiek Widyastuti H

Anggota DPR RI Gandung Pardiman usai bimtek Kementerian ESDM.

mun kemudian dialihkan ke pusat dan seiring terbitnya Perpres tersebut, masalah perizinan pertambangan didelegasikan ke provinsi. "Kita menyesuaikan dengan regulasi ter-

akhir dan kita siap. Harapannya perizinan pertambangan di DIY dapat berjalan baik. Dari sisi penggalan, lingkungan dan yang lain," tegasnya. **(Awh)-f**

Partai Demokrat Konsultasi ke KPU Sleman

SLEMAN (KR) - Partai Demokrat merupakan partai kedua yang melakukan konsultasi ke KPU Sleman. Dalam konsultasi itu, Partai Demokrat menanyakan berkaitan dengan masalah jadwal tahapan maupun aturan untuk Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sleman Ahmad Baehaqi menjelaskan, sebelumnya ada Partai Kedaulatan Rakyat yang telah berkonsultasi ke KPU Sleman. Kemudian kemarin giliran Partai Demokrat yang berkonsultasi. "Sampai hari ini sudah ada yang berkonsultasi ke KPU Sleman setelah kami membuka layanan helpdesk pada 1 Agus-

tus 2022. Untuk partai lainnya belum ada yang konfirmasi," katanya di kantor KPU Sleman, Kamis (4/8).

Adapun yang dikonsultasikan meliputi jadwal tahapan dan aturan berkait-

an proses pencalegan. Selain itu juga menanyakan mengenai jumlah daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Sleman. "Untuk jadwal proses tahapan tadi sudah kami jelaskan. Tapi untuk anturan pen-

calegan dan Dapil, kami masih menunggu aturan dari pusat," terang Ahmad.

Sementara Ketua DPC Demokrat Sleman Retno Widiyaningsih didampingi Sekretaris DPC Ossa Candra SE dan Bendahara DPC Rosihan Zulkifli mengaku, konsultasi tersebut untuk menanyakan berkaitan tahapan dan sejumlah aturan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Selain konsultasi, pihaknya juga menyerahkan SK kepengurusan baru DPC Demokrat Sleman. "Kami ini kan pengurus baru. Jadi kami perlu memahami sejumlah aturan, khususnya untuk pencalegan. Makanya kami datang ke KPU," katanya. **(Sni)-f**



KR-Saifullah Nur Ichwan

KPU menyerahkan jadwal tahapan Pemilu 2024 ke DPC Demokrat Sleman.



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasmya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

Mencarikan Solusi Terhadap Masalah Sosial

SLEMAN (KR)

Menjadi anggota legislatif akan menjadi sandaran masyarakat untuk mengadu terhadap permasalahan sosial yang dihadapinya. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan harus mempunyai solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

INDRA BANGSAWAN SE

Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Golkar



KR-Istimewa

Indra Bangsawan SE

Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Golkar Indra Bangsawan SE. Menurutnya, hampir setiap hari itu ada saja masyarakat yang berkunjung ke dirinya. Baik itu yang mengadu tentang permasalahan sosial maupun menyangkut pembangunan di wilayah.

"Ada masyarakat yang tidak tahu lagi bagaimana mencari solusi untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi. Makanya banyak masyarakat yang berkunjung ke saya," kata Indra, Kamis (4/8).

Sebagai anggota dewan, Indra berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Langkah yang dapat dilakukan adalah membantu mengaksakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

"Program JPS ini bisa untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin, khususnya yang tidak memiliki jaminan sosial. Baik itu untuk biaya kesehatan, pendidikan, maupun masalah sosial lain-

nya," ucap politisi muda dari Donokerto Turi Sleman ini.

Berdasarkan pengajuan dari masyarakat, ternyata masih banyak masyarakat yang nunggak pembayaran SPP sekolah. Selain itu juga ada masyarakat tidak terkaver BPJS sehingga tidak mampu untuk biaya berobat. "Dengan adanya JPS ini, pemerintah daerah melalui program JPS bisa membantu maksimal Rp 5 juta. Sedangkan bantuan untuk biaya kuliah maksimal Rp 7 juta," papar anggota Komisi D ini.

Sedangkan bagi masyarakat yang berkaitan pembangunan baik di padukuhan maupun kalurahan, Indra juga punya solusinya. Melalui pokok pikiran (pokir) dewan, Indra dapat mengaksakan anggaran untuk pembangunan wilayah. "Kalau ada yang minta bantuan pengaspalan jalan, penerangan jalan dan lainnya, akan saya masukkan dalam pokir saya. Supaya permintaan masyarakat itu bisa terakomodir," ucapnya.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan itu semua hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam prinsipnya, selama menjabat anggota dewan harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. "Saya duduk di dewan karena rakyat. Jadi selama saya duduk di legislatif, saya juga akan berbuat untuk rakyat," pungkas Indra. **(Sni)-f**

Kedaulatan Rakyat

EPAPER

www.kr.co.id



Epaper KR : 22-09-2020 Versi PDF

Hari ini, klik disini.



Berlangganan

Scan Barcode



Harian Kedaulatan Rakyat

juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper).

Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.